



Kekerasan Seksual Masih Dianggap Lumrah

JOGJA—Kekerasan seksual cenderung masih dianggap lumrah di masyarakat. Kepedulian semua pihak terhadap korban kekerasan seksual sangat diperlukan.

Yosef Leon, Afri Annisa Karin,
& Catur Dwi Janati
redaksi@harianjogja.com

Konselor psikologi Rifka Anisa, Siti Darmawati, mengatakan semua pihak perlu menyadari dan peduli terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual. Menurut Siti, sering kali korban enggan melapor lantaran merasa tak ada kepedulian dari orang-orang di sekitarnya. "Misalnya kita melihat ada pelecehan seksual dan tidak mau ikut-ikutan, karena males, ribet, dan

sebagainya jadi kesannya kita tidak peduli," katanya, Selasa (9/1). Pernyataan ini disampaikan Siti terkait dengan laporan dugaan kekerasan seksual yang terjadi di SD swasta di Kota Jogja. Kasus dengan 15 korban siswa dengan terduga pelaku seorang guru ini sudah dilaporkan ke Poltabes Jogja.

▶ Halaman 10

- ▶ Korban enggan melapor lantaran merasa tak ada kepedulian dari orang-orang di sekitarnya.
- ▶ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY sudah memiliki banyak program yang dijalankan untuk mengadvokasi korban kekerasan di wilayahnya.

Kekerasan...

Siti menuturkan sosialisasi sangat perlu dilakukan, termasuk di lingkungan pendidikan. Ini untuk memberi pemahaman soal bentuk kekerasan, macam, hingga cara bersikap ketika menjadi korban kekerasan. Siti meyakini upaya ini telah gencar dilakukan di tengah masyarakat. Namun, masih ada segelintir masyarakat yang belum memahami bahwa kekerasan seksual bisa menjadi kejahatan yang membahayakan. "Perlu ada perhatian khusus terutama anak-anak," katanya.

Siti menuturkan selama ini masih ada budaya *rape culture* di tengah masyarakat. Budaya ini memungkinkan adanya normalisasi pada gejala-gejala kekerasan seksual. Siti mengatakan kasus yang ditangani Rifka Anisa selama ini kebanyakan bermula dari gejala kecil. "Misalnya dari guynon, *cat calling*, kemudian itu dinormalisasi. Itu akan meningkat. 'Oh ini tak *godagodain* dia diam saja, bisa lah meningkat'. Sampai ada pelecehan secara verbal dan tidak ada apa-apa. Sampai kemudian terjadi, misalnya kekerasan seksual secara langsung. Kaya gitu bertahap," jelasnya.

Siti mengatakan masyarakat juga masih sering menganggap wajar perbuatan ringan seperti guynon yang mengarah ke kekerasan seksual. Ada juga anggapan bahwa diam itu berarti setuju. Gejala ini akan meningkat dan memungkinkan terjadinya kekerasan yang lebih parah lagi. "Masih ada anggapan lumrahlah cowok. Atau perempuan-perempuan yang ketika digoda diam saja, sehingga dilakukan kekerasan yang lebih parah lagi. Jadi, ada sikap-sikap yang cenderung tidak empati," jelasnya.

Banyak Program

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY sudah memiliki banyak program yang dijalankan untuk mengadvokasi korban kekerasan di wilayahnya. Selain memperkuat aturan soal penanganan

kekerasan, penanganan, dan pencegahan juga dilaksanakan lewat edukasi dan pelatihan kepada pendamping. "Untuk penanganan dan pencegahan kami kolaborasi dengan KPAID wilayah, DP3AP2KB masing-masing kabupaten kota, Rifka Anisa dan Dinas Pendidikan setempat," kata Kepala DP3AP2 DIY Erlina Hidayati Sumardi.

Erlina menerangkan instansinya juga sudah membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) yang merupakan forum koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring. FPPK bertujuan menjamin pelaksanaan pelayanan serta perlindungan korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak secara terpadu melalui mekanisme rujukan yang efektif dan efisien serta berbagai upaya pencegahan. "Keanggotaan FPKK terdiri dari instansi pemerintah daerah, instansi vertikal, RS, UPT PPA/ P2TP2A, APH, dan LSM," katanya.

Selanjutnya ada pula program yang memfasilitasi Telekonseling Sahabat Anak dan Keluarga (Tesaga). Tesaga DIY merupakan telekonseling psikologi terkait dengan pengasuhan, tumbuh kembang anak, remaja serta permasalahan perempuan dan keluarga. Program ini hadir untuk anak yang membutuhkan teman cerita dan yang membutuhkan konseling terhadap permasalahan yang dialami. Erlina juga telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) DIY. Satgas ini dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke UPT-PPA/P2TP2A.

Pemeriksaan Saksi

Sementara itu, Kasi Humas Polresta Jogja, AKP Timbul Sasana Raharjo menuturkan tiga orang saksi telah diperiksa terkait dugaan kekerasan seksual di sebuah SD swasta di Jogja. "Kepala sekolah dan dua orang guru," ujarnya.

Tak hanya itu, Unit PPA Polresta Jogja selanjutnya juga akan mengumpulkan keterangan lainnya, termasuk dari para orang tua korban. Timbul mengatakan Kepolisian juga akan meminta pemeriksaan psikologi korban dari Rifka Annisa. "Sehingga masih diperlukan pendalaman terkait berapa jumlah anak yang sebenarnya menjadi korban," katanya.

Di sisi lain, pemerintah telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di masing-masing sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Ery Widaryana, mengungkapkan seluruh sekolah di Sleman telah membentuk TPPK. Pembentukan TPPK akan mempengaruhi rapor pendidikan bagi sekolah. Karenanya di 2023 semua sekolah di Sleman telah tuntas membentuk TPPK. "Semua sekolah sudah membentuk. Timnya itu terus diunggah di *webste* Kemendikbud. Karena kalau belum membentuk itu nanti kan di rapor pendidikannya kan jadi rendah," kata Ery.

Terbentuknya TPPK diharapkan dapat mencegah dan menangani kekerasan yang dilakukan kepada anak. Di jenjang TK, pembentuk tim bisa bergabung dengan sekolah terdekat. "Misalkan satu sekolah, dua sekolah atau tiga sekolah yang dalam lingkup dekat itu bisa membentuk satu tim saja untuk menangani itu bersama-sama," tegasnya.

Dampaknya, setelah ada TPPK di akhir tahun 2023, Disdik Sleman tidak mendapatkan laporan terjadinya kekerasan pada anak. "Kalau ada laporan, itu kasus-kasus yang lama dalam rangka penyelesaiannya," lanjutnya.

Kepala Disdikpora Bantul Isdarmoko menyampaikan hingga saat ini telah 90% satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMP di Bantul yang memiliki TPPK. "Itu memang namanya kekerasan sudah menjadi permasalahan bukan hanya sekarang, tetapi sejak dulu aja, terkait dengan mekanisme pencegahan penanganan kita harus ada." (Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005